

**IMPLEMENTATION OF RURAL ECONOMIC
DEVELOPMENT POLICY
BASED POVERTY REDUCTION IN THE VILLAGE MLOWOKARANGTALUN
DISTRICT PULOKULON GROBOGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2012**

Oleh: **H. Basuki Rachmat**

ABSTRACT

Poverty is a phenomenon that is often found in villages and big cities in Indonesia, of the 240 million people of Indonesia based on the population census in 2011, by the Central Bureau of Statistics.

The poverty rate in Indonesia ranges from approximately 28 million people, is the responsibility of governments, and local governments. Poor people in Indonesia are mostly in villages and in big cities, they do not have the average habitable dwelling, income is not fixed and does not meet their daily needs, malnourished, so that their health was very bad.

Passing of Act 32 of 2004 on Regional Government, which the government gave autonomy to the local government, to organize the administration, development and public service areas, and given the authority to manage local finance both the reception area and local funding as well as digging potential areas that can be developed and improved revenue for the area.

So what is the problem areas well in the village, sub-district, district / city and provincial poverty means being direct responsibility for local government is to be able to handle it.

Mlowokarangtalun village located in the middle of teak forests controlled by Perum Perhutani and dihipit by two (2) hills of Mount Kendeng, infrastructure condition of the road infrastructure is very poor. The village has a wetland tadan wide enough rain, agricultural land management carried out during the rainy season, where the rainy season of the year is only about 7 (seven) months, and even then the rainfall conditions moderate.

The population of 5,605 souls is a very simple, innocent, there are over 900 souls krang citizens of poor households. Researchers interested, in presenting and analyzing how government policies and staff as well as villages in rural communities in conducting village-based economic development to alleviate poverty in the village Mlowokarangtalun until 2012.

Keyword: *based rural economic development in the village poverty reduction.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangganya sendiri secara otonom, seiring dengan pemberian kewenangan tersebut, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah dan menggali potensi-potensi sumberdaya alam daerah. Pembangunan ekonomi merupakan satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Satu permasalahan yang saat ini masih menghantui setiap pemerintah daerah adalah tentang kemiskinan, kemiskinan di Indonesia berada di Desa-desa dan sebagian dikota-kota besar. Ini merupakan beban yang harus dicariikan solusi pemecahannya, sehingga masalah kemiskinan dapat ditekan sedemikian rupa setiap tahunnya bahkan dapat dihapuskan sama sekali. Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu cara untuk memecahkan permasalahan kemiskinan di desa. Desa Mlowokarangtalun merupakan sebuah desa yang terletak diujung wilayah Kabupaten Grobogan dan berbatasan langsung Kabupaten Sragen, serta dekat dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Desa Mlowokarangtalun berada ditengah-tengah hutan jati dari pegunungan kendeng. Masyarakat Desa

Mlowokarangtalun sebagian besar merupakan petani dan buruh tani. Pola pertanian di Desa Mlowokarangtalun hanya mengandalkan sawah tadah hujan. Hanya sedikit sekali sawah yang dialiri oleh pengairan irigasi, kondisi tanah di Desa Mlowokarangtalun cukup subur, dan masyarakat merupakan tenaga kerja yang tangguh, ulet, sabar dan nerimo. Ini dibuktikan bahwa kondisi kehidupan masyarakat yang sangat harmonis, walaupun kondisinya sebagian besar serba kekurangan, perekonomian desa kesehariannya berjalan dengan apa adanya, masyarakat mempunyai aktivitas yang sangat bergairah serta kondisi keamanan sangat kondusif. Hanya saja masih terdapatnya warga masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin.

Indenteifikasi Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Pembangunan ekonomi desa berbasis pengentasan kemiskinan di Desa Mlowokarangtalun?
2. Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah Desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan Di Desa?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam mendukung Implementasi Kebijakan Pembangunan ekonomi berbasis kemiskinan di Desa Mlowokarangtalun?
4. Seberapa jauh keberhasilan pemerintah desa didalam mengurangi angka kemiskinan didesa Mlowokarangtalun?
5. Dari mana sumber dana nya untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan didesa?

Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan permasalahan yang ada, untuk lebih fokus dan terarah, penelitian ini akan membatasi pada permasalahan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan apa yang ditempuh pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Desa Mlowokarangtalun?
2. Seberapa besar keberhasilan pemerintah desa menyelesaikan permasalahan kemiskinan di desa Mlowokarangtalun?
3. Bagaimana bentuk peran masyarakat didalam mendukung program pengentasan kemiskinan di desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa?

Maksud penelitian

Maksud penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pemerintah desa melakukan pembangunan ekonomi desa berbasis pengentasan kemiskinan di Desa Mlowokarangtalun.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Kebijakan Pembangunan ekonomi desa berbasis pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan oleh pemerintah Desa beserta jajaran terkait dan masyarakatnya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini, apabila berhasil diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti baik secara teoritis maupun praktis, bagi masyarakat, pihak-pihak terkait dan bagi penulis dalam berkarier di dunia akademik.

Manfaat Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pada khususnya ilmu Ekonomi makro dan mikro ekonomi serta Manajemen Keuangan Daerah.

Manfaat Praktis

Memberikan gambaran seberapa besar keberhasilan implementasi Kebijakan Pembangunan ekonomi desa berbasis pengentasan kemiskinan di Desa Mlowokarangtalun.

Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperlus pengetahuan dan intelektualnya, sehingga sebagai tenaga dosen fungsional dapat mengambil pelajaran yang berarti untuk dikembangkan sebagai bahan ajar pada materi "Ekonomi Makro dan Mikro ekonomi serta Manajemen Keuangan Daerah"

Untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi Bidang Kajian Ilmu Manajemen Keuangan Daerah dan Bidang Ekonomi secara makro.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan proses yang meliputi langkah-langkah konkrit yang bersifat fleksibel dan terarah kepada apa yang akan dituju. Penelitian pada dasarnya adalah mencari, menghimpun, mengadakan pengukuran, menganalisis, sintesis, serta membandingkan, antara data-data lapangan serta menafsirkan hal-hal yang masih bersifat teka-teki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Arikunto (2010:3), menyelidiki keadaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian".

Penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hal ini dikarenakan permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Menurut Sugiyono (2011:245) " Analisis data kualitatif adalah bersifat Induktif " Analisis yang digunakan pada penelitian ini berlandaskan pada pengetahuan khusus, dimana fakta-fakta yang unik, dirangkai secara umum untuk dijadikan pemecahan masalah secara umum. Kesimpulan peneliti yang ditarik dari cara berpikir semacam ini ditempuh dengan jalan induktif.

Lingkup Penelitian

Yang menjadikan obyek dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembangunan desa berbasis pengentasan kemiskinan pada Desa Mlowokarangtalun."

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan mencermati benda-benda secara detail agar dapat dimaknai yang tersirat dalam dokumen, atau data-data. Menurut Arikunto dan Meleong (2012:22) sumber data kualitatif merupakan tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti serta benda-benda yang diamati oleh peneliti agar dapat dimaknai yang tersirat dalam dokumen atau bendanya " Dan Arikunto (2012:48) menambahkan " Sumber data adalah dari mana kita memperoleh data untuk bukti "Menurut Arikunto (2012:172) Sumber data dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Person, yaitu data yang diperoleh atau didapat dari orang yang memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis pada saat wawancara dengan menggunakan kuisioner.
2. Paper, yaitu data didapat, berupa simbol yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol lain. Pengertian paper tidak hanya sebatas kertas sesuai dengan terjemahannya dari Bahasa Inggris, tetapi semua media yang cocok untuk menggunakan metode dokumentasi. Data yang didapat dalam penelitian ini meliputi: data

Monografi Desa, Profil Desa, Data Ekonomi Pedesaan dan Data Pemberian Raskin serta Jaminan sosial lainnya di Desa Mlowokarangtalun di Kecamatan Pulokulon. Ditambahkan dengan data-data yang diperoleh dari pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten Grobogan.

3. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui Wawancara dari nara sumber pada saat dilakukan observasi lapangan.
4. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan berisikan informasi yang sangat akurat terkait dengan Judul Penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010:265) "Tehnik pengumpulan data atau metode observasi adalah suatu usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar " Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah berupa:

1. Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan sumber referensi lain untuk menunjang permasalahan yang diteliti serta yang memiliki hubungan dengan judul penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu tehnik pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung kelokasi penelitian secara langsung dengan mendatangi obyek yang akan diteliti.

Tehnik pengumpulan data dengan:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan data penelitian dengan mengadakan kontak langsung atau dialog antara peneliti dengan subyek atau responden penelitian. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

Menurut Sugiyono (2011: 233) " Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide- idenya " Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang ditemukan oleh informan.

Informan yang diwawancarai meliputi:

- a. Kepala Desa dan jajaran di Desa Mlowokarangtalun;
- b. BPD dan LKMD beserta jajarannya;
- c. Tokoh-tokoh masyarakat desa Mlowokarangtalun;
- d. Masyarakat Desa dan Ibu-ibu PKK Desa Mlowokarangtalun..

2. Dokumentasi atau pengukuran langsung

Pendekatan metode ini adalah, dilakukan penyelidikan pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa. Data diambil 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2011 dan 2012.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari Responden, dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahuinya. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen penelitian kualitatif. Dimana menurut Sugiyono (2011:222) yang menjadi instrumen atau alat penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian menggunakan alat bantu meliputi:

1. Pedoman wawancara;
2. Kamera Vidio;
3. memo/catatan;
4. dan alat-alat tulis.

Landasan Teoritis terkait Implementasi dan Kebijakan.

Menurut Sukasmanto (2004:73) dalam proses implementasi anggaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. **Tranparansi.**
Transparansi adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai beberapa atau berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan desa.
- b. **Akuntabilitas**
Yaitu kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawaban kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban dimaksud adalah menyangkut masalah financial.
- c. **Pemerintahan tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu yang menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat.**
- d. **Profesional, Yaitu, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sesuai dengan jabatannya.**

Implementasi Kebijakan terkait dengan Anggaran APB-Desa

APB-Desa, selain bersumber dari pendapatan asli desa, juga bersumber dari Bantuan pemerintah melalui Alokasi Dana Desa, dan PNPM Mandiri Pedesaan serta sumbangan masyarakat. Sumber-sumber keuangan ini mampu untuk mendorong mengatasi berbagai permasalahan di desa secara bertahap mandiri.

Terkait Peran Masyarakat

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1(2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan pada pasal 28 C (2) perubahan kedua, menyatakan: setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Landasan Teoritis terkait Kemiskinan

Menurut Ermaya Suradinata (1997: 146) Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran.

Biro Pusat Statistik (BPS)

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan absolute merupakan ukuran yang didasari pada kebutuhan akan kalori per hari, yang menurut BPS besarnya sebesar 2100 kalori/hari serta pengeluaran non makan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan adalah perumahan (bahan bakar, air bersih, dan penerangan), pakaian dan beberapa bahan tahan lama serta berbagai jasa terutama pendidikan dan kesehatan.

Untuk pengeluaran jenis pangan BPS tidak hanya mengambil beras sebagai patokan, tetapi berdasarkan keinginan pemerintah yaitu dengan pola keragaman pangan yang dapat diperoleh. Dengan nilai uang dari jumlah kalori tersebut dihitung berdasarkan perbandingan atau rasio antara konsumsi total rumah tangga, sehingga selanjutnya diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis kemiskinan. Contoh batas kemiskinan dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terbagi atas:

1. **Tingkat ketimpangan tinggi (*high inequality*) apabila 40% dari penduduk berpenghasilan rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan nasional.**

2. Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*) apabila 40 % dari penduduk berpenghasilan rendah menerima antara 12-17 % pendapatan nasional.
3. Tingkat ketimpangan sedang (*moderate inequality*) apabila 40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima antara 17 % pendapatan nasional.

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin.

Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Tahun 1982, Prof. DR. Emil Salim, dalam Jusman (1999:27) mengemukakan lima ciri mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, yaitu:

1. Umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti: tanah, modal, ataupun keterampilan yang cukup, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.
3. Tingkat pendidikannya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar, waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah dan mendapatkan tambahan penghasilan.
4. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah dan walaupun ada sangat kecil. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar sektor pertanian. Kesenambungan kerja kurang terjamin karena mereka bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah. Tidak sedikit jumlah mereka yang menjadi pekerja bebas dalam usaha apa saja (sektor informal).
5. Mereka yang hidup di daerah kota masih berusia muda dan tidak didukung dengan keterampilan yang memadai.

Penyebab Kemiskinan

Tjahya Supriatna (1997 : 20) menyatakan bahwa kondisi penduduk miskin disebabkan oleh:

1. Faktor penduduk yang terpuruk ke dalam lembah kemiskinan akibat dampak ketidak merataan hasil pembangunan.

2. Sikap mental penduduk yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural.

Kemiskinan alamiah ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidak berdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupu etnis sosial lainnya. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Harry Hikmat dalam Muhamad Hafar Hafsa (2008: 32) dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal (dari dalam individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangan kemampuan dalam hal:

- a. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)
Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kurang tahunya informasi)
- b. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, tempramental)
Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- c. Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan)
- d. Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja) Asset (misalnya tidak memiliki stock kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja)

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal (berada diluar individu atau keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan) antara lain:

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
- c. Terbatasnya lapang pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- e. Kebijakan perbankan terhadap pelayanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- f. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor reel masyarakat banyak
- f. Sistem mobilitas dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal.
- g. Dampak sosial negatif dan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program/ SAP*)
- h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- y. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

2. BAHASAN

GAMBARAN UMUM DESA MLOWOKARANGTALUN

Gambaran Umum Desa

Dasar Pembentukan Desa (Historis) secara harfiah, Mlowokarangtalun berasal dari bahasa Jawa, Mlowo, Karang, dan Talun. Mlowo merupakan nama buah mirip srikaya yang konon banyak terdapat ditempat ini. Karang berarti tempat, sedangkan Talun berarti rusa atau kijang. Sehingga Mlowokarangtalun dapat diartikan sebagai tempat/daerah dimana terdapat pohon mlowo tempat tinggal rusa atau kijang. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang sejarah dari Mlowokarangtalun. Namun, di masyarakat desa Mlowokarangtalun terdapat dua buah legenda yang berkaitan dengan terjadinya Desa Mlowokarangtalun. Legenda yang pertama terjadi masa kerajaan Hindu Budha. Menurut legenda tersebut, nama Mlowokarangtalun berasal dari nama kerajaan Hindu Budha yang bernama Malowopati yang diperintah oleh raja Anglingdarma yang beristrikan Dewi Setyawati. Berkaitan dengan cerita rakyat diatas, Desa Mlowokarangtalun memiliki beberapa tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Diantaranya adalah tempat yang dianggap sebagai lokasi Dewi Setyawati melakukan "Pati Obong" (bunuh diri dengan cara membakar diri), lokasi yang diduga bekas keraton Malowopati, dan beberapa tempat yang dianggap sebagai makam Punggawa kerajaan Malowopati, seperti Krapyak di dusun Mlowo, Asem Batur di dusun Sambong, dan Sentana di dusun Prau. Sedangkan kisah yang kedua terjadi setelah masa legenda yang pertama tadi. Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit, pengaruh Islam mulai masuk di wilayah tersebut. Dan ketika kerajaan Majapahit runtuh, pemerintahan dipegang oleh sembilan wali. Kesembilan wali ini berniat mendirikan pusat penyebaran agama islam. Pada awalnya masjid agung tersebut hendak didirikan di daerah sigit desa Pojok di atas lahan 0,6 Hektar. Namun rencana pembangunan di daerah ini gagal karena salah satu sahabat wali yang bernama Syeh Jufri Al Jauhari Saefullah meninggal di tempat tersebut.

Kemudian Syeh Jufri dimakamkan di tempat tersebut, dan baru-baru ini telah ditemukan dan menjadi tempat ziarah di Sigit. Karena gagal, kemudian para wali mencari tempat lain untuk mendirikan masjid Agung. Beberapa tempat sempat dipertimbangkan sebagai lokasinya, sebelum akhirnya mereka sepakat mendirikan masjid Agung di Demak. Pada saat pembangunan Masjid Agung, Sunan Kalijaga mendapat tugas mencari bahan untuk pembuatan Soko Agung Masjid. Sunan Kalijaga yang mengetahui banyak kayu jati yang bagus di hutan sekitar daerah Sigit, segera kembali ke daerah tersebut bersama pengikutnya. Dalam pencariannya, ketika sunan Kalijaga hendak melaksanakan shalat, diapun membutuhkan air untuk wudhu. Lalu dia menancapkan salah satu tongkatnya ke tanah dan pada saat itu dia merasakan ada aliran air di bawah tanah seperti talang. Daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama talang yang merupakan bagian wilayah sendang coyo. Peristiwa tersebut diyakini terjadi pada jumat legi bulan Suro. Oleh karena itu setiap jumat legi bulan Suro, masyarakat setempat mengadakan ritual di Sendang Coyo untuk memperingatinya.

Batas Desa, Desa Mlowokarangtalun adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Polukulon Kabupaten Grobogan, terletak 9 Km dari Ibukota Kecamatan dengan ketinggian 70 - 80 M dari permukaan laut. Maka jelaslah bahwa Desa Mlowokarangtalun merupakan daerah perbukitan dengan curah hujan 30 mm/tahun dan suhu udara rata-rata 30°C. Batas Desa Mlowokarangtalun sebagai berikut:

sebelah Utara dengan desa Sideredjo, sebelah Timur dengan desa simo, sebelah selatan dengan desa randuredjo, sebelah Barat dengan desa pojok.

Luas Desa dan Peruntukannya

Luas wilayah desa Mlowokarangtalun mencakup 1.494,436 Ha/m² yang terbagi menjadi 7 dusun.

Orbitasi

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan berjarak 9 Km, lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan dengan kendaraan bermotor selama 30 menit, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten dari desa Mlowokarangtalun mempunyai jarak tempuh 2 jam dengan jarak tempuh 33 KM, adapun ke Ibukota Provinsi berjarak 96 KM lama waktu tempuh selama 4 jam.

Demografi/ Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Mlowokarangtalun pada akhir Bulan Februari 2013 sebanyak 5692 orang. Terdiri dari : laki-laki sebanyak 2.756 jiwa sedang kan perempuan sebanyak 2.936 jiwa. Dan Kepala Keluarga 1980 Jiwa. Dan terdapat penduduk dalam kategori rumah tangga miskin sebanyak 900 jiwa. (berdasarkan data Monografi desa tahun 2012) atau sebanyak 15 % dari total penduduk.

Tabel: 1

Jumlah pendidikan dan sarana pendidikan serta jumlah guru dan murid tahun 2012

No	Jenis pendidikan	Jumlah Gedung	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	Kelompok bermain	1	2	40
2	T.K.	2	4	94
3	Sekolah Dasar	6	32	509
4	SMP	6	15	231
5	SMA	-	-	-
6.	Pondok Pesantren	1	4	50
7	Madrasah	4	10	103
8	Sekolah Luar Biasa	-	-	-
9	Sarana Pendidikan Non Formal	-	-	-

Sumber: Monografi Desa 2012

Mata Pencaharian:

Penduduk Desa mempunyai mata pencaharian berdasarkan data monografi desa tahun 2012 terdiri dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel: 2

Jumlah penduduk dan mata pencahariannya tahun 2011

No	Mata Pencaharian	Jumlah(orang)
1	Pegawai Negeri Sipil?TNI dan POLRI	356
2	Pensiunan PNS / ABRI	35
3	Pegawai Swasta	115

4	Petani	210
5	Buruh tani	1520
6	Pedagang Keliling	-
7	Wiraswasta	25
8	Pengusaha Kecil dan Menengah	44
9	Pertukangan	210
10	Jasa Lainnya.	25
	Jumlah	2.540

Sumber: Monografi Desa tahun 2012

Lembaga Ekonomi Desa

Desa Mlowokarangtalu memiliki lembaga ekonomi desa sebanyak 56 unit usaha, diantaranya: kios/warung 26 unit, pasar umum tradisional 1 buah, koperasi simpan pinjam 10 unit, Badan Usaha Kredit 1 unit, Industri kecil perumahan 14 unit, dan warung makan.

Potensi Desa

Desa Mlowokarangtalu memiliki bermacam potensi antara lain: 1) Potensi Umum. Potensi umum desa Mlowokarangtalu terdiri dari batas wilayah, sebelah utara desa sideredjo, sebelah selatan desa randuredjo, sebelah timur desa simo, dan sebelahbarat desa pojok. (sumber: Kantor Desa Mlowokarangtalu tahun 2012)

Topografi

Kondisi topografi desa Mlowokarangtalu : (1) Desa berada di dataran rendah seluas 24 hektar/m², (2) Desa berbukit seluas 33 hektar/m², (3) Desa pada tingkat ketinggian/pegunungan seluas 15 Hektar/m², (4) Desa dengan aliran sungai sepanjang 9600 hektar/m².

Tanaman Pangan

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan, jumlah keluarga yang memiliki lahan rata-rata kurang dari 1 ha, sedangkan yang memiliki lahan diatas 1 ha hanya tertentu dan sangat terbatas, sehingga sebagian besar warga masyarakat merupakan buruh tani dan bekerja dipenggilingan padi dan disawah. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini.

Tabel: 3

Jenis Tanaman dan produksi dalam Ton/Ha tahun 2011

No	Jenis tanaman	Luas tanam (Ha)	Produksi (Ha)
1	Jagung	35	2,5 Ton/Ha
2	Kacang Tanah	2	1,4 Ton/Ha
3	Kacang Panjang	0,75	0,4 Ton/Ha
4	Padi Ladang	30	4,2 Ton/Ha

5	Ubi Kayu	2,5	5,6 Ton/Ha
6	Ubi Jalar	45 Ha	14 Ton/Ha
7	Tomat	1	14 Ton/Ha
8	Buncis	5,2	3,5 Ton/Ha

Sumber: Kantor Desa Mlowokarangtalun tahun 2012

Perkebunan, Pemilikan Lahan Perkebunan

Keluarga yang memiliki lahan perkebunan 102 keluarga, memiliki kurang dari 5 hektar 102 keluarga, yang tidak memiliki 142 keluarga.

Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas perkebunan rakyat

Meliputi: 1. Kelapa rakyat luas 2, 75 hektar menghasilkan produksi 100,7 kw/hektar, (2) Cengkeh luas lahan 12 hektar menghasilkan produksi 25 Kw/hektar, (3) Pala luas lahan 8 hektar menghasilkan produksi 20 kw/hektar. Pada tahun 2011

Hasil Hutan:

Madu lebah menghasilkan produksi 10 liter/tahun, gula enau menghasilkan produksi 1,85 ton/tahun; Jenis hutan : (1) Hutan Produksi seluas 182 hektar, yang baik 58 hektar dan yang rusak 124 hektar, (2) Hutan lindung 298 hektar, yang baik 41 hektar dan yang rusak 257 hektar.

Peternakan:

Desa Mlowokarangtalun memiliki peternak sebanyak 383 warga masyarakat, dari 383 peternak, populasi yang dihasilkan sebanyak 36.311 ekor. Yang meliputi ternak, unggas, ternak sapi, serta ayam pejalan, ayam boiler dan ayam petelur.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dibantu Sekretaris Desa serta Kepala Dusun sebanyak 7 orang. Dan sebanyak 5 kepala urusan yang meliputi:

- (1) Kepala Urusan Umum, (2) Kepala Urusan Pembangunan; (3) Kepala Urusan Kesejahteraan; (4) Kepala Urusan Keuangan; (5) Kepala Urusan Pemerintahan.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dari jumlah wajib pajak sebanyak 2525 wajib pajak, dan 3535 orang jumlah SPPT yang diterbitkan, target realisasi ketetapan pajak sebesar Rp. 61.313.391.- dan terealisasi sebanyak Rp. 61.313.391.- berarti 100 % target tercapai.

Keuangan Desa

- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. Bantuan Pemerintah | sebesar | Rp. 85.650.000.- |
| 2. Pendapatan asli desa | sebesar | Rp. 255.930.000.- |
| 3. Pengeluaran sebesar | sebesar | Rp. 76.745.040.- |
| 4. Pengeluaran rutin | sebesar | Rp. 352.685.942.- |
| 5. Penerimaan tahun ini | sebesar | Rp. 425.940.260.- |
| 6. Sisa lebih anggaran tahun lalu | | Rp. 3.490,72 sen. |

Kondisi Desa Mlowokarangtalun di Gambarkan dalam Analisa SWOT.

KEKUATAN	KELEMAHAN	ANCAMAN	PELUANG
Memiliki penduduk sebanyak 5.605 Kepala Keluarga yang ada 2188 kepala keluarga.	Kondisi infrastruktur jalan desa, jalan dusun antar dusun sebagian besar rusak berat	Warga desa banyak yang bekerja diluar desa, karena keterbatasan lahan pekerjaan didesa.	Apabila desa memiliki lapangan pekerjaan yang cukup, maka masyarakat akan mencari napkah dan bekerja di Desa.
Ada sumber mata air 10 buah, sumur galinya 10 buah, Hidran umum 127 buahm jaringan pipa 92 jaringan.	Terbatasnya jaringan irigasi yang tersedia, untuk mengairi persawahan dan perkebunan, tidak memiliki embung-embung desa sebagai tempat penyimpanan air dikala musim hujan	Keterbatas sumber air bersih dan jaringan irigasi akan menyulitkan warga masyarakat beraktivitas mengolah lahan, ladang dan kebun, sehingga akan banyak lahan produktif yang ditelantarkan masyarakat karena sulitnya mendapatkan air.	Desa terletak ditengah hutan jati dan dihipit oleh pegunungan kendeng, sehingga diyakini bahwa sumber mata air ada, tinggal bagaimana pemerintah daerah mau mencoba menggali potensi sumber mata air baru.
Potensi Desa : 1.Lahan persawahan seluas7.585 Hektar; 2. Kondisi curah Hujan 2500 – 3000 MM; dan hanya 7 bulan dalam 1 tahun. 4.Memiliki lahan pertanian tanaman pangan yang cukup luas. Dan subur.	Aktivitas pertanian setahun 2 kali panen, selebihnya lahan ditanami palawija yang sedikit membutuhkan air. Sehingga pengolahan lahan tidak maksimal.	Jika tidak ditemukan sumber mata air baru, dikuatirkan lahan produktif banyak ditelantarkan.	Desa terletak ditengah hutan jati dan dihipit oleh pegunungan kendeng, sehingga diyakini bahwa sumber mata air ada, tinggal bagaimana pemerintah daerah mau mencoba menggali potensi sumber mata air baru.
Terdapat pasar desa sebanyak 1 buah, yang digunakan untuk bertransaksi ekonomi antar masyarakat desa sebanyak 2(kali) dalam seminggu.	Pasar desa bertransaksi hanya 2(dua) kali dalam seminggu,	Apabila pasar desa tidak dapat dikembangkan, dikawatirkan pertumbuhan ekonomi desa akan stakan dan masyarakat miskin didesa akan bertambah.	Pasar desa dapat dikembangkan untuk dilakukan transaksi perekonomian dalam seminggu lebih dari 2 kali hari pasar.
Terdapat 31 unit usaha Lembaga ekonomi didesa di Desa yang meliputi : Swalayan 8 buah; Pengolahan Kayu 12 buah; 11 buah kios dan warung-warung kecil.	Belum dikembangkannya unit-unit usaha kegiatan ekonomi pedesaan bagi masyarakat.	Apabila unit usaha ekonomi desa tidak dapat dikembangkan dari yang telah ada, dikawatirkan usaha-usaha ekonomi desa yang ada akan sulit melakukan intervensi usaha, dan pemerataan pendapatan masyarakat tidak akan terwujud, malah masyarakat miskin akan	Usaha ekonomi masyarakat masih dapat ditingkatkan dengan melakukan renovasi pasar desa yang ada saat ini Perbaiki sarana jalan desa agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi

		bertambah.	ekonomi sehari-hari.
Terdapat jumlah peternakan sebanyak 383 peternak dan populasi ternak sebanyak 36.311 ekor.	Peternakan dilakukan dengan cara tradisional, sehingga populasinya tidak maksimal.	Apabila jumlah peternak tidak bertambah, populasi ternak juga tidak tambah. Sehingga labat laun peternakan di Desa akan hilang.	Lahan ternak cukup luas, sehingga populasi dapat ditingkatkan .
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi, apabila Sarana	ADD yang diterima pemerintah terbatas.	Sulitnya melakukan pembangunan ekonomi desa berbasis pengentasan kemiskinan, dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah secara konsisten.	Kebersamaan dan kegotongroyongan selama ini merupakan modal utama yang sangat baik untuk membangun desa.
Desa setiap tahun mendapatkan bantuan dana dari Program PNPM Mandiri Pedesaan dan ADD	Dana PNPM mandiri dan ADD setiap tahunnya dirancang belum pada skala prioritas.	Apabila bantuan dana dari pemerintah, terbatas, maka dikuatirkan pembangunan sarana dan prasarana sulit diwujudkan dalam waktu singkat.	Keterbukaan diperlukan dari setiap jajaran aparatur desa kepada masyarakat.

3. Simpulan

Pemerintah desa Mlowokarangtalun, dalam membangun perekonomian desa berbasis pengentasan kemiskinan, telah mengambil kebijakan untuk melakukan renovasi pasar desa dan menata pasar desa sesuai tata ruang desa, yang memiliki lahan parkir kendaraan roda 2 dan 4 cukup luas. Pedagang-pedagang pasar ditata didalam pasar dengan tertib, tidak ada yang berjualan dipingir jalan-jalan disepanjang pasar desa.

Pemerintah desa bersama-sama warga masyarakat membangun jalan desa sesuai kemampuan dana yang dimiliki pemerintah desa dan dana yang bersumber dari partisipasi masyarakat.

Pemerintah Desa, memberikan bantuan modal bagi warga masyarakat yang berdagang, tetapi kondisi permodalan terbatas, dengan bunga sangat ringan dan diberikan secara bergulir.

Dengan pemberian dana bergulir untuk permodalan bagi masyarakat, maka memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk berusaha, sehingga lapangan kerja dapat dipenuhi secara bertahap. Dan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, sehingga angka kemiskinan lambat laun berkurang. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat antusias, dan berperan secara aktif.

4. Saran

Diperlukan pemberdayaan masyarakat desa, untuk mengolah hasil pertanian yang memiliki nilai tambah yang lebih baik, jika dibandingkan dengan dijual hanya sebagai bahan mentah saja.

Diperlukan perubahan pola peternakan dari pola tradisional ke pola semi modern

Atau modern sehingga pada aspek peternakan dapat dikembangkan dan ditingkatkan jumlah peternak dan populasi ternak setiap tahunnya baik pada ternak unggas dan ternak sapi.

Diperlukan adanya suntikan tambahan dana baik melalui program PNPM mandiri pedesaan dan Alokasi Dana Desa(ADD) setiap tahun kepada Desa Mlowokarangtalun, serta diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif untuk membangun desanya. Dengan adanya tambahan dana bantuan

kepada desa untuk membangun desa, dapat dipastikan masyarakat desa akan berpartisipasi, tinggal bagaimana pendekatan jajaran aparatur desa mendekati masyarakat.

Masih terdapat tanah kas Desa yang digunakan oleh sebagian masyarakat desa untuk tempat tinggal dan tempat usaha, sampai saat ini belum dibuatkan Peraturan Desa (PERDES) dan belum dipungut kontribusinya setiap tahun, hal ini sangat strategis bagi pemasukan pendapatan asli desa, sehingga perlu dimusyawarahkan dengan pihak-pihak pengguna tanah kas desa dan segera dibuatkan peraturan desa, agar yang memanfaatkan tanah kas desa dapat dikenakan pungutan atau memberikan kontribusi secara syah dan legal bagi pendapatan desa setiap tahun. Dan Dananya masuk dalam APBD-Desa untuk digunakan membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Michael P. Todaro Dan Stephen C. Smith.2003, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jakarta: Erlangga
- Mubyarto .1993, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan.Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto, 1984. Strategi Pembangunan Pedesaan, P3PK UGM Yogyakarta.
- Mubyarto.2000, Membangun Sistem Ekonomi, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPF
- Sajogyo. 1982. Bunga Rampai Perekonomian Desa, Yayasan Obor Indonesia.
- Saptana, Tri Pranadji, Syahyuti, dan Roosgandha. 2003. Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan (Studi Kasus di Provinsi Bali dan Bengkulu). Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sarman Mukhtar dan Sajogyo.2000. Masalah Penanggulangan Kemiskinan . Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia, Puspa Swara.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997, Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Grasindo, Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS, PT Gramedia, Jakarta
- Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta
- Tjahya Supriatna (1997 : 20), Penyebab Kemiskinan. .
- Michael P. Todaro, Diterjemahkan oleh Drs.Haris Munandar, MA, “ Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta , 2000.
- Dr. H. Akmal Boedianto, SH, M.Hum, MSi. Membangun APBD yang partisipatif pada era otonomi daerah, ITS. Press Surabaya 2010.
- Undang-undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.